

Siaran Pers

KEPALA BAPPENAS: DALAM RKP 2019 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT TERMASUK PROGRAM PRIORITAS

JAKARTA (04/5) – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas. Untuk kebijakan 5 Prioritas Nasional terdiri dari 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. 2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. 3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. 4) Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air. 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk Prioritas Nasional pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, pemerintah, kata Bambang, mengedepankan lima Program Prioritas yaitu: Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; Penanggulangan Bencana; dan Peningkatan Sistem Logistik. Lima Program Prioritas tersebut, menurut Bambang merupakan upaya mengatasi masalah beberapa isu strategis dalam aspek pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; tingginya harga logistik pada daerah-daerah aksesibilitas sulit termasuk Papua dan Papua Barat; Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan; Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana; Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan.

Menurut Bambang, yang juga dikenal sebagai ahli ekonomi pembangunan, untuk Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Kegiatan Prioritas yang akan dilakukan antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua. “Tiga Kegiatan Prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71, 89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. Menurut Bambang, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Sebelumnya, pada tanggal 30 April 2018, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas RKP 2019. Musrenbangnas RKP 2019 dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Jakarta, 04 Mei 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id